



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
TAHUN 2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KIPM BAUBAU

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 adalah Target Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Baubau di masa mendatang.

Baubau, Juli 2025

Kepala SKIPM Baubau



YUNI IRAWATI WIJAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 VISI DAN MISI	5
2.2 SASARAN KINERJA	5
3 AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 CAPAIAN KINERJA	7
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
3.3 REALISASI ANGGARAN	17
4. PENUTUP	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP	2
Gambar 3. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2025	4
Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP	5
Gambar 5. Tangkapan Layar ekinerjaku.kkp.go.id	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025	6
Tabel 2.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2025	6
Tabel 3.	Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 4.	Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	9
Tabel 5.	Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	11
Tabel 6.	Capaian IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	12
Tabel 7.	Capaian IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	13
Tabel 8.	Capaian IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau	14
Tabel 9.	Capaian IK 6. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	16
Tabel 10.	Capaian IK 7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	17
Tabel 11.	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau .	20
Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja	23
Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025	24
Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25
Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id	26
Lampiran 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.....	27
Lampiran 7. Nilai Capaian IP ASN	28
Lampiran 8. Capaian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	29

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Baubau. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai Eselon I dari UPT SKIPM Baubau adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, SKIPM Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
- c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM Baubau, Kepala Stasiun dibantu oleh Plt. Kepala Urusan Umum dan Jabatan Fungsional. Total jumlah seluruh pegawai sebanyak 25 orang dengan rincian 11 ASN (10 orang PNS dan 1 orang PPPK), 10 PPNNPN masuk database BKN dan 4 orang PJLP. Dari jumlah 11 ASN tersebut 8 orang diantaranya adalah pejabat fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (7 PNS dan 1 orang PPPK), 1 orang Fungsional APK APBN, 2 orang Fungsional Umum.

STRUKTUR ORGANISASI SKIPM BAUBAU TAHUN 2025

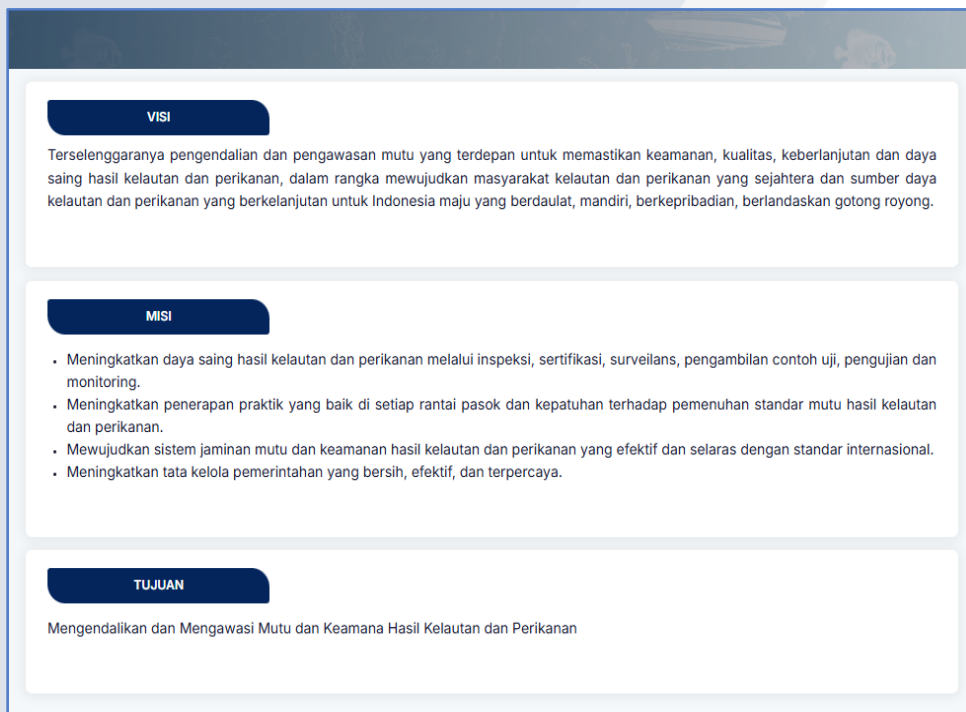


Gambar 3. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2025

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk menjamin mutu hasil perikanan nasional.

2.2. SASARAN KINERJA

Untuk mendukung tercapainya tujuan BPPMHKP, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, SKIPM Baubau menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau

seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99	
SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100	
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87	
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85	
	7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88	

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.005.080.000,- (*Tiga Milyar Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

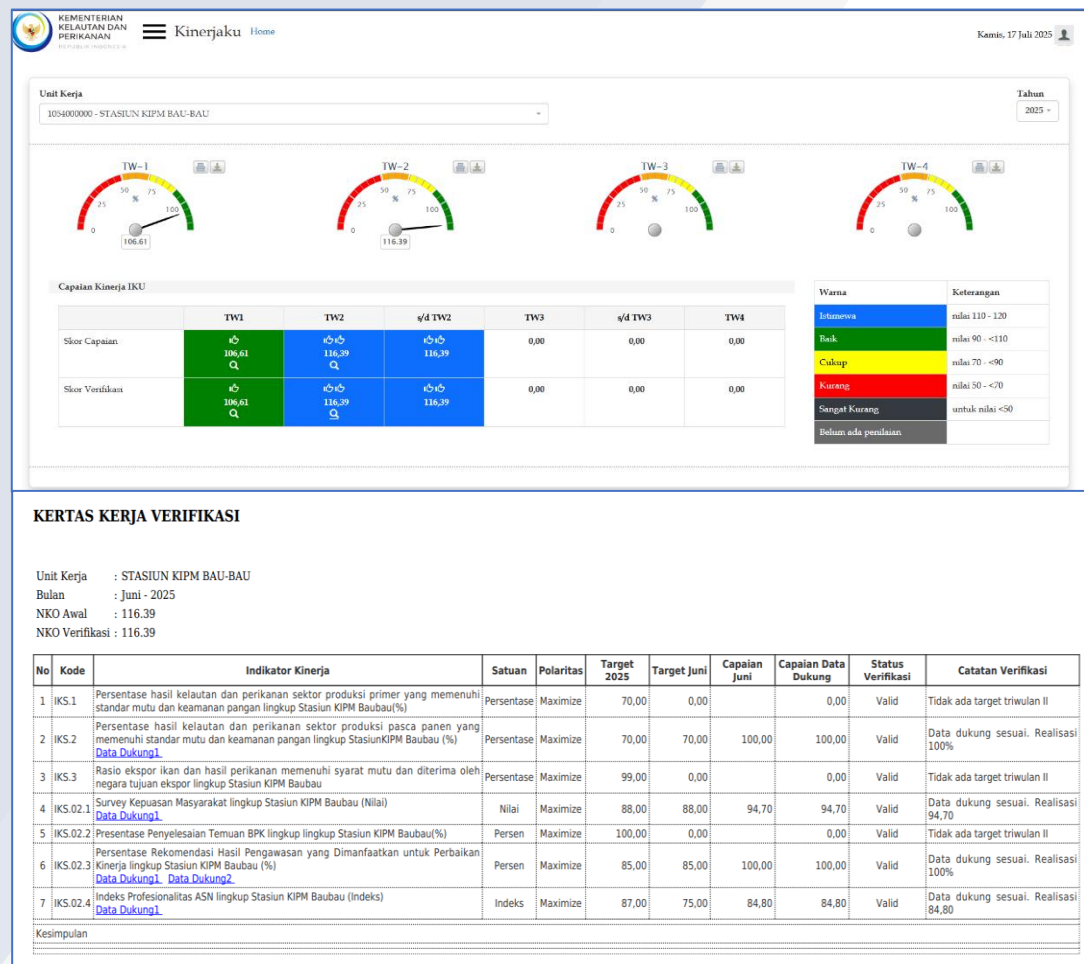
Tabel 2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2025 .

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.848.140.000,-
2.	Manajemen Mutu	-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.940.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025		3.005.080.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Baubau Triwulan II 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **116.39 %**, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id



Gambar 5. Tangkapan Layar ekinerjaku.kkp.go.id

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama tahun 2025. Adapun capaian kinerja triwulan I dan II tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I dan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI		
		TARGET TAHUNAN	TW I	TW II
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70		
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70		100
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99	100	
2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100		
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87		84,8
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85	100	100
	7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88	93,92	94,70

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi

CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa **rekomendasi** yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Tabel 4. Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	0	0	0

Pada Triwulan II ini untuk IKU Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau tidak ada target dan juga belum ada realisasi.

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Tabel 5. Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70	100	120

Pada Triwulan II ini untuk IKU Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau terdapat realisasi 100% berdasarkan hasil kegiatan verifikasi dokumen permohonan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan dapat diterbitkannya sertifikat SKP dengan grade A sebanyak 6 (enam) sertifikat. Dengan demikian pelaksanaan pada Triwulan II atau Semester I ini mencapai 100% dari target 70% sehingga secara persentase tercapai atau capaian kinerja sebesar 142,85% sama dengan nilai kinerja maksimal 120%

IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang

diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 6. Capaian IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	0	0	0

Sesuai tabel di atas, untuk Triwulan II ini capaian IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau tidak ada target dan capaian.

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Tabel 7. Capaian IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	0	0	0

IKU 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) ini merupakan capaian tahunan dan di triwulan ini tidak ada target.

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam

melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2025, target indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau sebesar 87 % dan pengukurannya akan dilakukan setiap semester dalam setiap tahunnya.

Tabel 8. Capaian IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau	75	84,8	113,07

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau merupakan target semesteran dan pada Triwulan II atau Semester I ini capaiannya adalah 84,8 dari target sebesar 75 sehingga persentase capaian terhadap target adalah 113,07 %.

IK 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Baubau

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai

$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

berikut:

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 85 % dengan realisasi di Triwulan II sebesar 100 % sehingga persentase capaian terhadap target sebesar **117,6%** dan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Capaian IK 6. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	85	100	117,6

IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di SKIPM Baubau menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Capaian untuk IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)

Indikator Kinerja	Target TW II 2025	Realisasi TW II	% Thd Target
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88	94,70	107,61

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Baubau pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. **3.005.080.000** (*Tiga Milyar Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*). Namun dengan adanya perubahan organisasi, anggaran tersebut digabung dengan anggaran satker SKIPM Kendari dengan total anggaran seluruhnya sebesar Rp. **8,203,239,000** (*Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Dan untuk realisasi penyerapan anggaran untuk anggaran SKIPM Baubau tidak dapat dilaporkan secara terpisah dengan realisasi anggaran SKIPM Kendari dikarenakan SKIPM Baubau tidak lagi mengelola anggaran sendiri. Adapun realisasi anggaran seluruhnya untuk satker SKIPM Baubau dan SKIPM Kendari untuk Triwulan II tahun 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja untuk SKIPM Baubau dan SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	4,483,494,000	1.989,167,298	44,37
2.	Belanja Barang	3,719,745,000	961,022,055	25,84
3.	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	8,203,239,000	2,950,189,353	35.96

PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum terealisasi.

Beberapa IKU yang belum terealisasi lebih disebabkan oleh target pelaksanaannya yang bukan terealisasi pada Triwulan II ini melainkan pada triwulan berikutnya sesuai target IKU masing-masing.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, SKIPM Baubau tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan relaksasi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan II SKIPM Baubau Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri

Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuni Irawati Wijaya**
 Jabatan : **Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Dikandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau



Dikandatangani Secara Elektronik

Yuni Irawati Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100
		5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87
		6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85
		7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.848.140.000
2.	Manajemen Mutu	-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.940.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025		3.005.080.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Baubau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yuni Irawati Wijaya

Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

No	SS / IKU	Target							
		Tw 1	Tw 2	Sm 1	Tw 3	sd Tw 3	Tw 4	Sm 2	Tahun
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
	a. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	70	70	70
	b. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan kemanan pangan lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	70	70	70
	c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup SKIPM Baubau	-	-	-	-	-	99	99	99
2	Tatakelola pemerintahan Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan								
	a. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	100	100	100
	b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	-	87	87	-	-	87	87	87
	c. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	85	85	85
	d. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	88	88	88	88	88	88	88	88

Baubau, 16 Januari 2025

Kepala



Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P
NIP. 196906091998032002

Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan SKIPM Kendari Triwulan II Tahun 2025

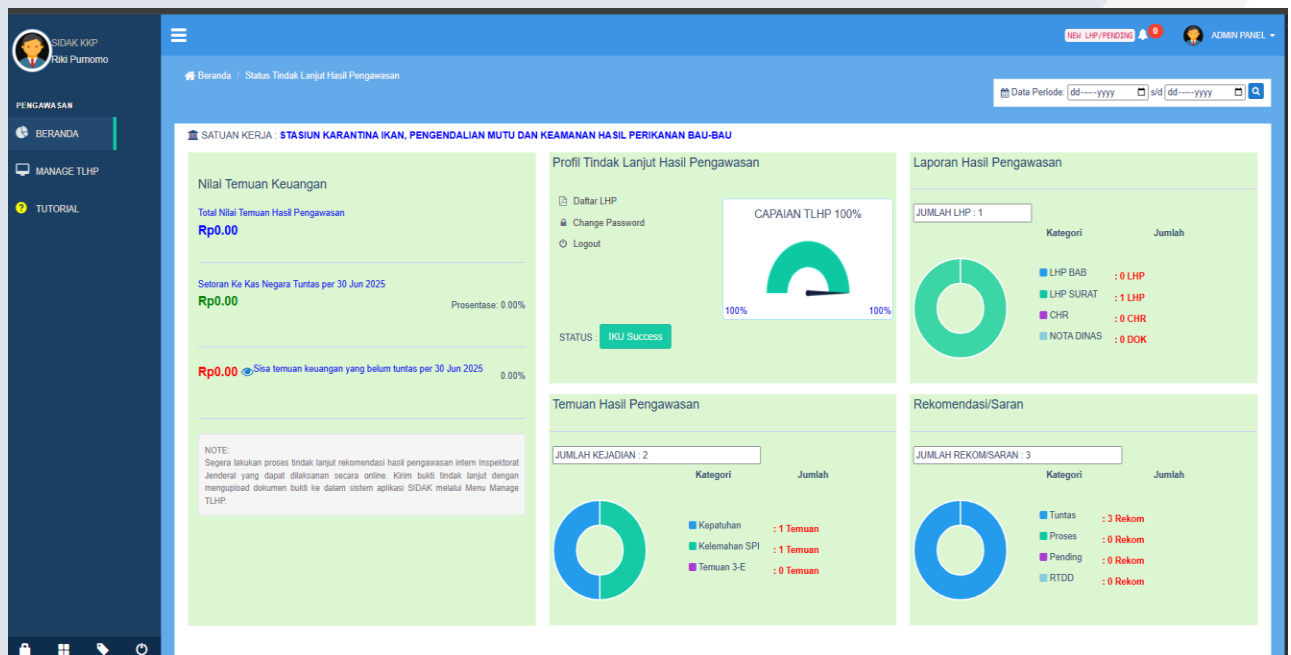
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI 567694

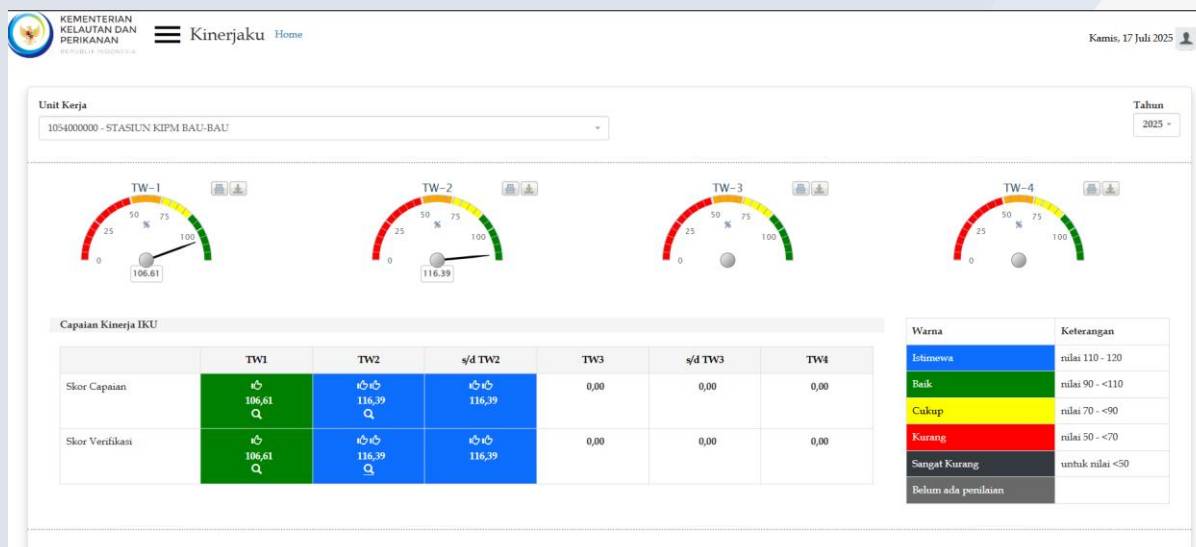
Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM
Tgl Cetak : 15/07/25 9:25 AM
Halaman : 1
lap_hra_hack_sakker_new_groc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BARAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BARAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Penghasilan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penarikan Negara Bukan Pajak	192,850,000	2,585,998	(190,264,002)	1.34	120,888,000	187,195,364	(12,804,616)	89.33
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kelangkaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan SLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penarikan Negara Bukan Pajak Lainnya	192,850,000	2,585,998	(190,264,002)	1.34	120,888,000	187,195,364	(12,804,616)	89.33
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	192,850,000	2,585,998	(190,264,002)	1.34	120,888,000	187,195,364	(12,804,616)	89.33
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,203,239,000	2,950,189,353	(5,253,049,647)	35.96	3,819,974,000	1,927,129,395	(1,892,844,605)	50.45
1. Belanja Pegawai	4,453,494,000	1,589,167,298	(2,864,326,702)	44.37	1,766,470,000	1,410,197,024	(356,272,976)	79.83
2. Belanja Barang	3,719,745,000	961,022,055	(2,758,722,945)	25.84	2,053,504,000	916,932,371	(1,136,571,629)	25.17
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id



KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : STASIUN KIPM BAU-BAU
 Bulan : Juni - 2025
 NKO Awal : 116.39
 NKO Verifikasi : 116.39

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKS.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau(%)	Persentase	Maximize	70,00	0,00		0,00	Valid	Tidak ada target triwulan II
2	IKS.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	Persentase	Maximize	70,00	70,00	100,00	100,00	Valid	Data dukung sesuai. Realisasi 100%
3	IKS.3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	Persentase	Maximize	99,00	0,00		0,00	Valid	Tidak ada target triwulan II
4	IKS.02.1	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	Nilai	Maximize	88,00	88,00	94,70	94,70	Valid	Data dukung sesuai. Realisasi 94,70
5	IKS.02.2	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau(%)	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Tidak ada target triwulan II
6	IKS.02.3	Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	Persen	Maximize	85,00	85,00	100,00	100,00	Valid	Data dukung sesuai. Realisasi 100%
7	IKS.02.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	Indeks	Maximize	87,00	75,00	84,80	84,80	Valid	Data dukung sesuai. Realisasi 84,80
Kesimpulan										

Lampiran 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat



Lampiran 7. Nilai Capaian IP ASN

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Carli

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
46	STASIUN KIPM BIMA	6	23.33	93.32 %	27.79	69.47 %	25	83.33 %	4.5	90 %	80.62	SEDANG
47	STASIUN KIPM TAHUNA	11	22.73	90.92 %	23.18	57.95 %	25	83.33 %	5	100 %	75.91	SEDANG
48	STASIUN KIPM BAU-BAU	11	21.82	87.28 %	32.98	82.45 %	25	83.33 %	5	100 %	84.8	TINGGI
49	STASIUN KIPM MERAK	11	22.27	89.08 %	30.02	75.05 %	25	83.33 %	5	100 %	82.3	TINGGI
50	STASIUN KIPM MAMUJU	12	22.5	90 %	29.9	74.75 %	25	83.33 %	5	100 %	82.4	TINGGI
51	BALAI UJI STANDAR KIPM	21	22.38	89.52 %	30.19	75.48 %	25	83.33 %	4.81	96.2 %	82.38	TINGGI

<

1

2

3

>

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik NIP atau Nama

Carli

Download

troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin	IP		
1	YUNI IRAWATI WUJAYA	S-2	25	20	10	-	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI
2	DIAN RATNA SARI	S-1	20	20	-	0	-	4	24	BAIK	25	0	5	74	SEDANG
3	ABDUL SYUKUR YASIN	S-2	25	20	-	10	-	4	34	BAIK	25	0	5	89	TINGGI
4	SITI MARLINA KADIR	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
5	SAPTARI JOAN TATRA	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
6	ALEXANDER WICAKSONO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
7	BAMBANG S	D-III	25	20	-	-	0	4.75	24.75	BAIK	25	0	5	79.75	SEDANG
8	NIKADEK WIRATI	D-III/D-I/SMA	20	20	-	-	10	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
9	RIKI PURNOMO	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
10	I PUTU SUGIASA	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	85	TINGGI
11	SUPRIADI	D-III	25	20	-	10	-	5	35	BAIK	25	0	5	90	TINGGI

<

>



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10213 - Industri Pembekuan Ikan
<i>10213 - Fish Processing and Cold Storage Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025

Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025

Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260004

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039347
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37279/74/SKP/BK/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Tuna Beku
Frozen Tuna
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling,
Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600240001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
<i>10217 - Fish Cooling/Icing Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 93791 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600240001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039348
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37280/74/SKP/SG/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Tuna Segar
Fresh Tuna
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pendinginan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Dingin, Pemuatan
Receiving, Handling, Chilling, Packing/Labeling, Chill
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10213 - Industri Pembekuan Ikan
<i>10213 - Fish Processing and Cold Storage Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025

Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025

Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260006

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039350
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37282/74/SKP/BK/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakatua, Kakap)
Frozen Demersal Fish (Grouper, Parrotfish, Snapper)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan,
Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Cold Storing,
Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600240002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10217 - Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
<i>10217 - Fish Cooling/Icing Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 93791 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025
Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025
Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600240002

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039346
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37278/74/SKP/SG/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Demersal Segar (Kerapu, Kakatua, Kakap)
Fresh Demersal Fish (Grouper, Parrotfish, Snapper)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600260007

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10213 - Industri Pembekuan Ikan
<i>10213 - Fish Processing and Cold Storage Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Wandoka, Wandoka Utara, Wangi-
Wangi, Kab. Wakatobi. Sulawesi Tenggara
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025

Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025

Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600260007

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039351
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37283/74/SKP/BK/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Pelagis Beku (Barakuda, Lemadang, Layang, Tenggiri)
Frozen Pelagic Fish (Barracuda, Mahi-mahi, Shortfin Scad, Wahoo)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Handling, Packing/Labelling, Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:812000185299600250001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT ARTA MINA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 8120001852996 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : PELABUHAN SAMUDERA NIZAM
ZACHMAN TRANSID SHED NO.10 A
DERMAGA BARAT, Desa/Kelurahan
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm.
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 14440 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10293 - Industri Pembekuan Biota Air
Lainnya
10293 - <i>Aquatic Biota Processing and Cold Storage Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jl. Poros Wandoka, Lingkungan Antapia
Desa/Kelurahan Wandoka Utara, Kec.
Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, Provinsi
Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 93791 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 10 Juni 2025

Issued date : 10 June 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 11 Juni 2025

Printed date : 11 June 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 812000185299600250001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00039349
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 37281/74/SKP/BK/VI/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. ARTA MINA JAYA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Cephalopoda Beku (Gurita)
Frozen Cephalopods (Octopus)
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling,
Cold Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : A

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 10 Juni 2025
10 June 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 10 Juni 2027
10 June 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.

